

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal ini, merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penulisan penelitian. Berikut review hasil-hasil penelitian terdahulu:

**Tabel 2. 1**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Mustika (2016)	Pertumbuhan Ekonomi, (PAD), dan (DAU) terhadap Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi linier berganda	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal
2.	Nugroho (2016)	Pertumbuhan Ekonomi, (PAD), dan (DAU) terhadap Belanja Modal	Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi	Analisis regresi linier berganda	Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
3.	Arwati (2015)	Pertumbuhan Ekonomi, (PAD), dan (DAU) terhadap	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,	Analisis linier berganda	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan

		Belanja Modal			terhadap Belanja Modal
4.	Novita (2015)	Pertumbuhan Ekonomi, (PAD), dan (DAU) terhadap Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah	Analisis regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal
5.	Sularno (2015)	Pertumbuhan Ekonomi, (PAD), dan (DAU) terhadap Belanja Modal	Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah	Statistik deskriptif dan Regresi linier berganda	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal
6.	Ivana (2015)	Pertumbuhan Ekonomi, (PAD), dan (DAU) terhadap Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum	Analisis regresi berganda	Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal.
7.	Harianto (2016)	Pertumbuhan Ekonomi, (PAD), dan (DAU) terhadap Belanja Modal	Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi	Analisis Regresi	Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal
8.	Brave (2015)	<i>The Effect of Economic Growth, Regional</i>	<i>General Allocation Funds, Capital</i>	<i>Linier regression analysis</i>	Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif

		<i>Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures</i>	<i>Expenditures</i>		yang signifikan terhadap belanja modal yang ditolak
9.	<i>Newbery (2015)</i>	<i>The Effect of Economic Growth, Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures</i>	<i>General Allocation Funds, Capital Expenditures</i>	<i>Linear regression analysis</i>	Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Belanja Modal
10.	<i>Maxwell (2015)</i>	<i>The Effect of Economic Growth, Regional Original Income and General Allocation Funds on Capital Expenditures</i>	<i>Economic Growth, General Allocation Funds</i>	<i>Linear regression analysis</i>	Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh pada Belanja Modal

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi bersangkut paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas menurut (Boediono, 2015). Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Pertumbuhan Ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya Pertumbuhan Ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. “Secara tradisional, Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB” (Saranggih, 2014). Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDRB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur keseluruhan performa dari suatu perekonomian.

### **2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Halim (2015 : 67) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah,

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

### **1. Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Jenis-jenis pajak daerah adalah:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran dan Rumah Makan
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Badan Galian Golongan C
- 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Pemukiman

### **2. Retribusi Daerah**

Sumber pendapatan lain yang dapat dikategorikan dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2013).

Retribusi daerah dapat dibagi dalam beberapa kelompok yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

### **3. Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Salah satu penyebab diberlakukannya otonomi daerah adalah tingginya campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan roda pemerintahan daerah. Termasuk didalamnya adalah pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sektor industry. Dengan adanya otonomi daerah maka inilah saatnya bagi daerah untuk mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha

Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

#### **4. Lain-lain Pendapatan yang sah**

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Alternatif untuk memperoleh pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintahan pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa dengan menerbitkan obligasi daerah.

### **2.2.3 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (UU 32/2004). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana hibah (grants) yang kewenangan pengguna diserahkan penuh kepada Pemda penerima.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengertian dana alokasi umum yaitu: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dengan perimbangan tersebut, khususnya DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

#### **2.2.4 Belanja Modal**

. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2014 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2014 sumber pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah lainnya dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Halim (2015:101) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintahan daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama:

##### **1) Belanja Modal Tanah**

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, baik nama dan sewa tanah, pengasongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.



## **2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan, mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan/mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## **3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dalam kondisi siap pakai.

## **4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

## **5) Belanja Modal Fisik Lainnya**

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

## **2.3 Hubungan antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal**

Kebijakan otonomi daerah merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah. Hal ini mendorong pemerintahan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, kemudian daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokasinya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya (Nugroho, 2016).

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah. Dengan adanya pengaruh yang signifikan antara desentralisasi fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi maka pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar bagi Pertumbuhan Ekonomi.

**H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.**

### **2.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal**

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat (UU No.32/24). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi daerah setempat menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan tersebut.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh terhadap tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal oleh pemerintah.

## **H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.**

### **2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal**

Pelaksanaan desentralisasi, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah, menimbulkan konsekuensi pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sendiri. Pendanaan ini untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang ada di daerah (UU No. 33/2004)

Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Hampir sama dengan PAD, DAU

merupakan salah satu sumber pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Bedanya PAD berasal dari uang masyarakat sedangkan DAU berasal dari APBN yang mempunyai tujuan khusus.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal.

**H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.**

#### **2.3.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita. Secara tradisional Pertumbuhan Ekonomi ditunjukkan untuk peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah/PDRB. Pertumbuhan Ekonomi yang baik harus didukung dengan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang memadai guna memperlancar kegiatan ekonomi. Biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah setempat akan terus meningkatkan Belanja Modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarana, tetapi disesuaikan pada tahun anggaran.

Berdasar pendapat-pendapat dan pengertian dari masing masing variabel bebas yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Belanja Modal.

**H4 : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.**

#### 2.4 Pengembangan Hipotesis

Rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

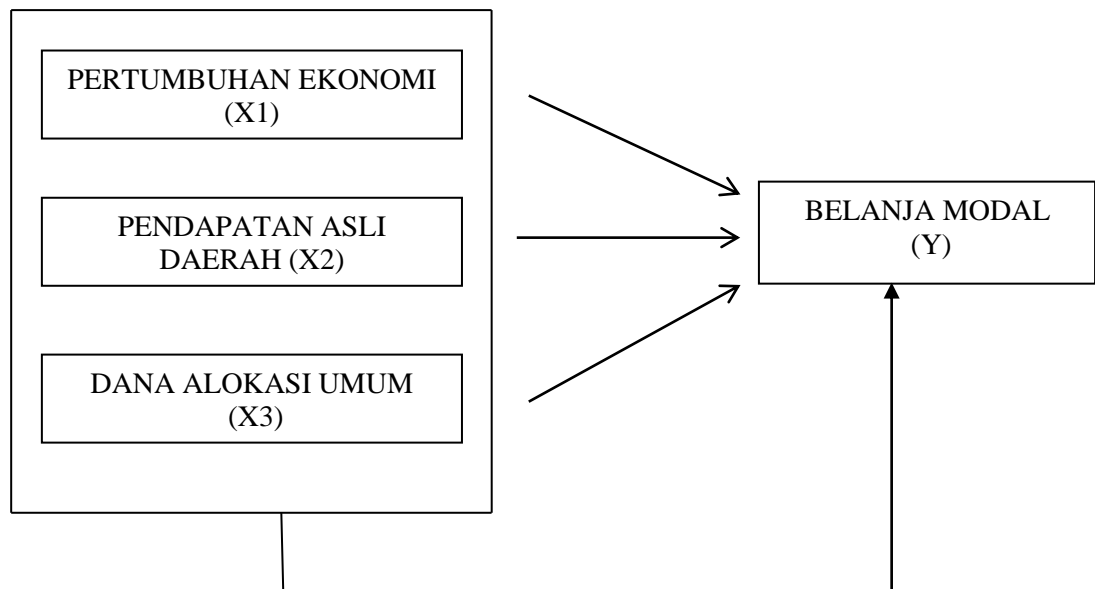
H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

H4 : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**